



LEBONG

KAMIS, 11 NOVEMBER 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Banyak Pengusutan Korupsi Mandeg

Berharap KPK Turun Tangan

LEBONG UTARA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu diminta lebih maksimal mengawasi jalannya pengusutan kasus dugaan korupsi oleh jajarannya di Kabupaten Lebong. Soalnya banyak pengusutan korupsi yang terindikasi mandeg di Kabupaten Lebong.

Mulai dari dugaan korupsi pembangunan intake dan jaringan pipa air baku di Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara tahun 2017 senilai Rp 16,6 miliar yang ditangani Polres Lebong sejak 2018. "Sampai saat ini pengusutannya tidak jelas masih lanjut atau tidak, yang jelas sampai saat ini belum ada tersangkanya," kata tokoh pemuda Lebong, Riki Febrian.

Selanjutnya pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat peraga matematika di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lebong tahun 2016 senilai Rp 4,8 miliar yang juga ditangani Polres Lebong sejak 2017. "Kasus ini juga masih meninggalkan tanya karena sejauh ini, rasanya tidak ada penerbitan SP3 (surat perintah pemberhentian penyidikan, red)," terang Riki.

Senada disampaikan tokoh masyarakat Lebong, Anwar Thalib yang menanyakan kejelasan dugaan korupsi pembangunan rumah susun PNS di Kelurahan Tanjung Agung senilai Rp 54,7 miliar tahun 2019 yang sempat dilirik Kejari Lebong. "Apakah jadi diusut atau tidak, yang jelas pihak kejari sempat Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan, red)," tukas Rozy.

Atas kondisi itu, Anwar berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangani langsung kasus korupsi di Lebong. Soalnya penegakan hukum atas dugaan korupsi di Lebong selama ini belum memuaskan.

Sementara terkait tingginya potensi korupsi di Lebong, Korsup KPK Bidang Pencegahan Wilayah Bengkulu, Azril Zah meminta Pemkab Lebong lebih maksimal melakukan pencegahan penyelewengan atas penggunaan anggaran. Bahkan masyarakat dimintanya proaktif mengawasi kegiatan yang bersumber dari uang negara. "Sampaikan laporan ke KPK kalau menemukan indikasi korupsi," tandas Azril di sela rakor MCP di Pemkab Lebong, kemarin (10/11).(sca)